

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pemerintah (*Government Organization*) merupakan organisasi sektor publik terbesar. Dalam menjalankan roda pemerintahannya maka pemerintah menggunakan sebuah instrumen yang disebut dengan APBN untuk pemerintah pusat dan APBD untuk pemerintah daerah. Ketika memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia Presiden Soekarno pernah menyampaikan bahwa setelah Indonesia merdeka maka Negara Indonesia harus siap untuk menjadi bangsa yang mandiri. Mandiri dalam hal ini adalah Bangsa Indonesia harus mampu menjalankan roda pemerintahan tanpa adanya ketergantungan (finansial) dari negara lain. Semakin tinggi kemandirian suatu bangsa maka kedaulatan negara akan semakin tinggi dan tentunya akan disegani oleh negara-negara lain. Apabila suatu negara dalam menjalankan kewajibannya terlalu bergantung pada pembiayaan (hutang) dari pihak luar negeri sedangkan kemampuan pendapatannya tidak mencukupi untuk melaksanakan kewajibannya (belanja dan transfer negara) maka kedaulatan negara tersebut akan semakin rendah. Sehingga segala kebijakan di negara tersebut akan mudah diinterfensi oleh pihak (negara) yang memberikan hutang.

Pada saat ini kemajuan akuntansi nir laba khususnya di Indonesia berkembang pesat dengan era baru dalam penerapan pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah mempunyai pengaruh yang besar terhadap nasib suatu daerah karena dapat dijadikan tolak ukur bisa berkembang atau tidak, tergantung bagaimana mengelola keuangan.

Pengelolaan keuangan daerah yang baik akan menjaga aset daerah tetap utuh.

Agar mencapai daerah yang pertumbuhan ekonominya tinggi maka strategi dan kebijakan ekonomi pembangunan harus fokus pada sektor strategis dan potensial di daerah baik itu sektor riil, keuangan, dan infrastruktur guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Lain dari pada itu, pemantauan dan evaluasi hasil pembangunan juga sangat penting dilakukan secara berkala melalui penyajian data statistik yang berkualitas. Peran pemerintah daerah dalam mengelola keuangan sangat menentukan keberhasilan peningkatan pertumbuhan ekonomi suatu daerah.

Kinerja pemerintah daerah merupakan kunci keberhasilan daerah otonom dalam pengelolaan keuangannya dengan cara menaati peraturan perundang-undangan, ekonomis, efektif, efisien, bertanggung jawab, dan transparan. Pengelolaan keuangan daerah dilakukan dalam suatu sistem terpadu yang diwujudkan dalam APBD yang setiap tahun ditetapkan dengan Perda (PP nomor 58 tahun 2005 pasal 4). Kekuatan finansial sangat penting pada suatu pemerintahan karena tanpa kemampuan keuangan suatu pemerintah daerah tidak dapat menjalankan secara efektif dan efisien fungsinya tanpa didukung biaya yang cukup untuk pelaksanaan pembangunan yang berorientasi pada kepentingan rakyat. Hal tersebut menjadi salah satu kriteria dasar untuk mengetahui kemampuan nyata daerah dalam mengatur ususannya sendiri.

Kapasitas keuangan daerah di era otonomi daerah seringkali diukur menggunakan kinerja keuangan daerah. Kinerja keuangan daerah atau kapasitas daerah adalah salah satu ukuran yang dapat dipergunakan untuk melihat kemampuan daerah dalam melaksanakan otonomi daerah. Bentuk penilaian kinerja berupa rasio keuangan yang dibentuk dari unsur laporan

pertanggungjawaban gubernur, bupati atau walikota berupa APBD (Halim, 2012: 212). Pengukuran kinerja keuangan daerah begitu penting untuk menilai akuntabilitas Pemda dalam pengelolaan keuangan daerah. Akuntabilitas bukan hanya kemampuan menunjukkan bagaimana uang publik digunakan, tetapi mencakup kemampuan untuk menunjukkan bahwa uang publik telah dibelanjakan secara ekonomis, efektif, dan efisien. Efisien memiliki pengertian yakni penggunaan uang rakyat memperoleh output maksimal. Efisien yaitu penggunaan dana publik mencapai sasaran atau tujuan kepentingan umum, ekonomis yang berkaitan pada pemilihan serta penggunaan sumber daya pada kuantitas dan kualitas tertentu dengan harga yang murah (Mardiasmo, 2013: 182).

Dari berbagai cara untuk menganalisa kinerja suatu laporan keuangan pemerintah, analisa rasio dapat menjadi cara mengukur suatu kinerja keuangan pada APBD yang telah disepakati bersama dan dilaksanakan. Analisa rasio yang dimaksud dapat berupa rasio kemandirian keuangan pemda, rasio keserasian, rasio pertumbuhan, serta rasio efektivitas dan efisiensi (Halim, 2012: 230). Pada metode rasio kemandirian memaparkan bagaimana ketergantungan keuangan daerah terhadap peran dana dari luar. Jika rasio kemandirian semakin tinggi dapat diartikan ketergantungan kekuatan keuangan dari pihak luar tentunya semakin rendah. Jika suatu negara maupun daerah memiliki kemandirian yang tinggi maka kedaulatan suatu wilayah semakin diperhitungkan dikanca lokal maupun internasional. Pada rasio keserasian mendeskripsikan hal-hal yang dilakukan pemerintah daerah untuk memprioritaskan alokasi dana terhadap belanja rutin dan belanja pembangunan dengan optimal (Halim, 2012: 221-234). Semakin tinggi prosentase kemandirian berarti tingkat ketergantungan daerah pada bantuan eksternal semakin berkurang. Sedangkan rasio

kesesuaian menunjukkan bahwa dengan rasio belanja modal yang relatif kecil perlu ditingkatkan sesuai dengan kebutuhan pembangunan daerah (Halim, 2012: 221-234). Artinya harapan dibentuknya daerah otonomi yakni mandiri secara finansial dan efektif serta efisien dalam penggunaan dana rakyat sebagaimana yang tertuang dalam APBD.

Pada tanggal 10 Juni 2009 Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meresmikan Jembatan Tol Suramadu dimana salah satu harapan masyarakat yakni perekonomian di Madura dapat meningkat dan sejajar dengan Kota Surabaya yang dirasa lebih maju. Namun setelah 10 tahun sejak diresmikannya Jembatan Suramadu tersebut, pertumbuhan ekonomi di Madura dirasa tidak meningkat secara signifikan. Terbukti salah satu indikatornya ketidaksamaan UMK antara Surabaya dengan Madura sangat jauh (tidak sejauh daerah disekitar Surabaya misalnya Mojokerto, Sidoarjo, dan Gresik). Atas hal ini peneliti ingin mengetahui mengapa pembangunan di Madura cenderung timpang dengan Surabaya.

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“PERTUMBUHAN EKONOMI DENGAN MENGGUNAKAN METODE ANALISIS KEMANDIRIAN: STUDI KASUS APBD DAN LRA PEMERINTAH DAERAH KOTA SURABAYA DAN SELURUH KABUPATEN DI MADURA TAHUN 2014 - 2018”**.

1.2 Rumusan Masalah

Sebagaimana diuraikan dalam latar belakang yang telah dipaparkan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini meliputi:

1. Bagaimana penilaian Kemandirian dilihat dari analisa rasio PAD terhadap total pendapatan masing-masing Pemerintah Daerah Surabaya dan Madura?

2. Bagaimana kemampuan PAD masing-masing Pemerintah Daerah Surabaya dan Madura untuk melaksanakan belanja dan transfer yang merupakan kewajibannya?
3. Bagaimana (berdasarkan analisis rasio) ketergantungan pendapatan transfer dari pemerintah pusat dan pihak-pihak lain untuk melaksanakan kewajiban belanja dan transfer masing-masing Pemerintah Daerah Surabaya dan Madura?
4. Belanja atau transfer apa yang memiliki prosentase paling tinggi terhadap total belanja dan transfer masing-masing Pemerintah Daerah Surabaya dan Madura?

1.3 Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Pengetahuan mengenai kinerja kemandirian keuangan pemerintah kabupaten dan kota melalui analisis rasio dengan mereview post rekening PAD Pemerintah Daerah Surabaya dan Madura terhadap total penerimaan penerimaan Pemerintah Daerah Surabaya dan Madura.
2. Mengetahui kemampuan PAD masing-masing Pemerintah Daerah Surabaya dan Madura untuk melakukan kewajiban belanja guna untuk pembangunan masyarakat direview dari beberapa periode.
3. Menilai apakah Pemerintah Daerah Surabaya dan Madura dalam kegiatan penerimaannya untuk memenuhi kewajiban berupa belanja daerah masih sangat bergantung pada transfer dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, maupun pihak lain atau tidak.
4. Diketahui bahwa untuk kegiatan pembangunan masyarakat tidak hanya memenuhi kegiatan administratif pemerintahan saja namun perlu diperhatikan pula sektor pendidikan, kesehatan, dan pembangunan infrastruktur. Oleh karena itu, penelitian ini untuk mengetahui belanja apa

yang memiliki prosentase paling tinggi terhadap total belanja daerah dari tahun ketahun (2014 hingga 2018).

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif terhadap beberapa aspek. Aspek-aspek sebagaimana yang dimaksud meliputi:

1. Aspek Akademis

- a. Diharapkan dalam penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi dalam penelitian selanjutnya.
- b. Perguruan Tinggi sebagai lembaga pendidikan tinggi yang mengemban amanah tri darma perguruan tinggi, melalui penelitian diharapkan dapat berperan dalam memberikan kontribusi positif kepada daerah, khususnya Kota Surabaya dan seluruh kabupaten yang ada di Madura.

2. Aspek Pengembangan Ilmu Pengetahuan

Dari aspek pengembangan ilmu pengetahuan penelitian ini dapat menambah wawasan bagi masyarakat tentang paradigma suatu praktik ilmu pengetahuan.

3. Aspek Praktis

Diharapkan dari kesimpulan ini dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi pihak-pihak pembuat kebijakan publik dimana dalam hal ini masyarakat Surabaya dan Madura.